Melemahnya Oposisi di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke

Benedictus Eric Hariyanto¹; Christophorus Rinovan Prasetyo Widi²; Paskalis Ronaldo³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

¹ ericharijantabenedictus@gmail.com

² christophorusrinovan@gmail.com

³ paskalisronaldo6@gmail.com

Abstract:

Di tengah dinamika politik Indonesia, peran oposisi sebagai elemen pengawasan mengalami pelemahan signifikan selama pemerintahan Joko Widodo. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif teori pemisahan kekuasaan John Locke, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi otoritas dan potensi munculnya tirani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan mengandalkan kajian literatur dan data empiris serta artikel ilmiah terkait. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa dominasi kekuasaan eksekutif di era Jokowi tidak hanya mengurangi efektivitas parlemen sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mereduksi fungsi oposisi dalam menyediakan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini melemahkan mekanisme check and balance yang esensial dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, serta menciptakan iklim politik yang kurang kondusif bagi partisipasi demokratis yang sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadaan ini mengarah pada potensi sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan esensi demokrasi modern, serta memperkuat kecenderungan politik sentralistik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi peran oposisi, serta penguatan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga legislatif untuk memastikan keseimbangan kekuasaan yang sehat dan demokratis di masa depan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Key words: Demokrasi, Politik, Kekuasaan, Oposisi, Pemerintahan.

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan demokrasi modern, pemisahan kekuasaan menjadi elemen fundamental yang bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang adil dan akuntabel. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh John Locke, seorang filsuf politik terkemuka abad ke-17.¹ Locke menekankan bahwa kekuasaan hendaknya dibagi ke dalam tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan

¹ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam" *Jurnal Selat*. 4.1 (2016).

yudikatif. Pemisahan ini merupakan mekanisme utama untuk mencegah munculnya tirani, menjaga kebebasan individu, dan memastikan pemerintahan yang efektif. Menurut Locke, kekuasaan yang tidak terkontrol cenderung disalahgunakan, sehingga penting untuk membagi otoritas guna menciptakan keseimbangan dan pengawasan antar cabang kekuasaan.²

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, secara konstitusional mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan ini.³ Sejak era reformasi, sistem demokrasi Indonesia mengalami berbagai perbaikan, dengan mengutamakan pembagian kekuasaan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip *check and balance*. Namun, dinamika politik di era pemerintahan Joko Widodo menunjukkan adanya pergeseran.⁴ Peran oposisi, yang sejatinya menjadi pengawas utama terhadap kinerja eksekutif, mengalami pelemahan signifikan. Parlemen, yang idealnya menjadi arena diskusi dan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, cenderung menunjukkan pola persetujuan yang berulang tanpa adanya kritik yang konstruktif.

Pelemahan peran oposisi ini menjadi fenomena yang penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pemikiran John Locke tentang pemisahan kekuasaan. Jika dalam teori Locke, oposisi dianggap sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif untuk mencegah otoritarianisme, maka kondisi di Indonesia saat ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem demokrasi yang ada. Apakah dominasi kekuasaan eksekutif di bawah pemerintahan Jokowi merupakan cerminan dari kegagalan prinsip pemisahan kekuasaan? Ataukah Jokowi justru menunjukkan pergeseran demokrasi Indonesia ke arah yang lebih sentralistik?

Penelitian ini akan mengkaji fenomena melemahnya oposisi di era Jokowi melalui analisis filosofis berbasis teori pemisahan kekuasaan oleh John Locke. Dengan menyoroti relevansi teori ini dalam konteks pemerintahan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap fungsi oposisi dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Kajian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dampak dari pelemahan oposisi terhadap sistem demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Mengingat pentingnya oposisi sebagai salah satu pilar demokrasi, penelitian ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik saat ini, di mana kekuatan oposisi dianggap semakin terkikis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat diskursus akademis terkait peran oposisi dalam sistem politik Indonesia serta memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang digunakan berdasarkan kajian literatur yang meliputi buku-buku teori politik, jurnal ilmiah,

² Buhar Hamja, "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi" *Justisia*. 7.14 (2020).

³ Deddy Supriady Bratakusumah, "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia" *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. 2.3 (2018).

⁴ Mirza Satria Buana, "Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum" *UNDANG: Jurnal Hukum*. 6.2 (2023).

dan tulisan-tulisan kontemporer. Penelitian ini menganalisis teori pemisahan kekuasaan John Locke, dengan fokus pada pencegahan tirani dan efisiensi pemerintahan, serta membandingkannya dengan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya pada pemerintahan Joko Widodo. Kajian juga mencakup konsep *trias politica* Montesquieu dan penerapannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Melalui analisis komparatif, penelitian ini menyoroti melemahnya peran oposisi dan dominasi eksekutif dalam masa pemerintahan Jokowi, serta dampaknya terhadap sistem *check and balance* dan akuntabilitas dalam demokrasi Indonesia.

Hasil Penelitian

A. John Locke dan Pemikirannya

a) Latar Belakang Kehidupan John Locke dan Situasi Masyarakat Pada Masanya

John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang sangat berpengaruh pada abad ke-17, sebuah era yang penuh dengan perubahan besar di Eropa.⁵ Periode ini sering disebut sebagai Zaman Pencerahan atau *Age of Enlightenment*. Ciri khas zaman ini adalah munculnya semangat rasionalisme, di mana manusia mulai menggunakan akal dan logika untuk memahami dunia dan masyarakat, bukan hanya mengandalkan dogma agama atau tradisi.⁶ Pemikirannya tentang pemerintahan, hak-hak alami, dan epistemologi (teori pengetahuan) telah membentuk dasar bagi banyak ide-ide politik dan filosofis modern. Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris. Keluarganya berasal dari kelas menengah dan memiliki sejumlah properti. Ayahnya bekerja sebagai seorang pengacara dan terlibat dalam pemerintahan lokal. Locke mendapatkan pendidikan di Universitas Oxford. Ada beberapa pemikiran yang menjadi ide utama dalam konsep atau teori yang diungkapkan oleh Locke; salah satunya adalah pemerintahan yang terbatas.⁷ Locke berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Jika pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka rakyat berhak untuk memberontak. Pemikiran John Locke sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat politik dan ilmu pengetahuan. Ide-ide tentang hak-hak alami, pemerintahan terbatas, dan toleransi beragama yang diusulkan oleh Locke menjadi dasar bagi banyak revolusi dan konstitusi di seluruh dunia, termasuk Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.⁸

b) Teori Pemisahan Kekuasaan John Locke

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Locke berakar pada gagasan bahwa kekuasaan mutlak di tangan satu orang atau kelompok kecil dapat menindas hak-hak individu.⁹ Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Locke mengusulkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang yang terpisah dan saling mengawasi.¹⁰ Teori ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan modern, khususnya dalam konsep demokrasi. Montesquieu telah meletakkan dasar-dasar

⁵ F.Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, vol. (Jakarta: Gramedia, 2007).

⁶ Ibid.

⁷ Ignatius Haryanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*, vol. (Jakarta: Gramedia, 2021).

⁸ Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*.

⁹ Haryanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*.

¹⁰ J.W. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, vol. (London: Oxford University Press, 1950).

pemikiran tiga cabang kekuasaan, tetapi Locke tidak secara eksplisit menyebutkannya. Secara umum, pembagian kekuasaan menurut Locke dapat dibagi menjadi tiga cabang utama¹¹:

- Kekuasaan Legislatif: Cabang ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Undang-undang ini harus dibuat berdasarkan persetujuan rakyat dan bertujuan untuk melindungi hak-hak alami rakyat.
- Kekuasaan Eksekutif: Cabang ini bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Kekuasaan eksekutif juga memiliki wewenang untuk menjaga keamanan negara dan melindungi hak-hak warganya.
- Kekuasaan Yudikatif: Cabang ini memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa. Kekuasaan yudikatif harus bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya.

Teori pemisahan kekuasaan Locke telah menjadi inspirasi bagi banyak sistem politik modern. Konsep ini diadopsi dalam banyak konstitusi negara-negara di seluruh dunia. Contoh dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat tertuang secara jelas dalam sistem pemerintahannya, dengan adanya lembaga legislatif (Kongres), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung).

c) Alasan Pencegahan Tirani dan Memastikan Kinerja Pemerintahan yang Efektif

Pemisahan kekuasaan menjadi hal yang penting dalam pemerintahan terutama untuk mencegah tirani dan memastikan kinerja pemerintahan yang efektif. Dengan melihat teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke ada beberapa poin penting yang menjadi tujuan pentingnya pemisahan kekuasaan sebagai upaya pencegahan tirani, yaitu mencegah konsentrasi kekuasaan, mencegah dan mengatasi penindasan, serta mencegah korupsi. Mencegah konsentrasi kekuasaan, ketika kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil, potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Sejarah telah mencatat banyak contoh pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Untuk mencegah dan mengatasi penindasan, konsentrasi kekuasaan dapat mengarah pada penindasan terhadap kelompok minoritas, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, pejabat pemerintah dapat menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Kemudian pemisahan kekuasaan menurut John Locke juga dapat memastikan bahwa kinerja pemerintah telah berlangsung dengan efektif untuk kepentingan rakyat.¹² Adapun fungsi dari pemisahan kekuasaan untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif sebagai berikut *check and balances*, efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi.¹³ Pemisahan kekuasaan menciptakan sistem *check and balances* di mana setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan membatasi. Hal ini mencegah munculnya kebijakan yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab dari pemerintah. Penerapan sistem *check and balances*

¹¹ John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, Trans. A Widyamartaya, vol. 2 (Yogyakarta: Kanisius, 2002).

¹² Gough, *John Locke's Political Philosophy*.

¹³ Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*.

juga pada akhirnya dapat memunculkan efisiensi kinerja yang artinya bahwa setiap cabang kekuasaan dapat berfokus pada tugas utamanya sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian, pemisahan kekuasaan dapat mendorong akuntabilitas. Setiap cabang kekuasaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan. Pemisahan kekuasaan adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern.¹⁴

B. Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia

a) Pengertian Demokrasi Secara Umum

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.¹⁵ Dalam sistem ini, rakyat secara langsung atau tidak langsung berperan dalam pembuatan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Sistem pemerintahan demokrasi memiliki ciri-ciri utama, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan individu, pemerintahan yang terbatas.¹⁶ Demokrasi sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat secara langsung terlibat dalam menentukan keputusan, contohnya melalui referendum, sedangkan demokrasi tidak langsung rakyat memilih wakil-wakil mereka dalam membuat keputusan, misalnya melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif seperti yang berlaku di Indonesia.

b) Sejarah Dan Praktik Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.¹⁷ Konsep demokrasi di Indonesia mengalami berbagai fase, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan tersendiri. Berikut perjalanan sejarah dan praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia¹⁸:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Meskipun memberikan hak suara kepada rakyat, periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Maklumat No. X yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta pada November 1945 menegaskan perlunya partai politik dalam sistem demokrasi ini.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, menandai dimulainya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan" *Jurnal Konstitusi*. 10.2 (2016).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Fitria Qutrul Nada, Aswatun Hasanah, dan Siti Tiara Maulia, "Perjalan Demokrasi di Indonesia" *CIVILIA: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2.2 (2023).

¹⁸ Affan Akbar dkk., "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" *Advances in Sosial Humanities Research*. 1.5 (2023).

pada presiden dengan pembatasan peran partai politik dan media. Meskipun bertujuan untuk mengatasi perpecahan politik, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang menerapkan demokrasi Pancasila. Sistem ini menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan berpendapat. Meskipun nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

4. Reformasi dan Demokrasi Pasca-Soeharto (1998-sekarang)

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan memulai transisi menuju demokrasi yang lebih substantif. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat *checks and balances* antar lembaga negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan bebas, serta kebebasan pers semakin terbuka. Meskipun demikian, tantangan dalam konsolidasi demokrasi masih terus ada, seperti korupsi dan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan perubahan. Dari sistem parlementer awal hingga demokrasi Pancasila dan reformasi pasca-Soeharto, setiap fase menunjukkan dinamika politik yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah bangsa.¹⁹ Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan hak asasi manusia tetap menjadi fondasi penting dalam praktik demokrasi di Indonesia saat ini.

c) Definisi Oposisi Dan Perannya Dalam Menjaga Akuntabilitas Pemerintah

Secara harfiah, kata “oposisi” berasal dari bahasa Inggris “*opposition*,” yang berarti berlawanan. Dalam konteks politik, oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.²¹

Oposisi memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas pemerintah melalui beberapa cara, yaitu mengawasi pemerintahan, memberikan alternatif kebijakan, melindungi hak kelompok minoritas, dan menjadi stimulus persaingan antar elite pemerintah.²² Oposisi dalam politik memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Dengan fungsi-fungsinya, oposisi memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kepentingan masyarakat luas.²³ Oleh karena itu, oposisi adalah bagian integral dari dinamika demokratis yang berlangsung di setiap negara demokrasi.

Pembahasan

¹⁹ Nada, Hasanah, dan Maulia, “Perjalan Demokrasi di Indonesia.”

²⁰ Munadi Munadi, “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. 2.1 (2019).

²¹ Ibid.

²² Firman Noor, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia” *Masyarakat Indonesia*. 42.1 (2016).

²³ Ibid.

Sebagai sebuah negara, Indonesia sudah mengalami pelbagai dinamika ideologi politik yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Terhitung sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah berulang kali mengalami pergantian paham ideologi politik. Tentu saja, fenomena tersebut disebabkan oleh banyak faktor, entah itu dinamika internal kehidupan berbangsa dan bernegara, atau bahkan dinamika eksternal yang memberi pengaruh signifikan bagi Indonesia. Berkaca pada sejarah, pada periode awal pasca kemerdekaan, negara Indonesia berpijak pada sistem “demokrasi parlementer” (1950-1959). Sistem ini memungkinkan diskusi politik yang cenderung terbuka dan terbentuknya pelbagai macam partai politik. Kondisi ekonomi dan politik yang relatif tidak stabil waktu itu membuat sistem demokrasi parlementer tidak bertahan lama di Indonesia. Tak lama berselang, sistem “demokrasi terpimpin” (1959-1966) muncul ke permukaan sebagai respon atas tenggelamnya demokrasi parlementer. Sistem baru ini memberlakukan sentralisasi kekuasaan pada presiden untuk mewujudkan persatuan nasional yang kokoh. Pemantik dicetuskannya sistem pemerintahan tersebut adalah maraknya gerakan separatis yang mengancam persatuan negara yang baru seumur jagung ini. Fenomena “lepas-pasang” sistem demokrasi di Indonesia mencapai kulminasinya pada tahun 1998, dimana momen runtuhnya rezim Orde Baru membimbing Indonesia pada reformasi sistem pemerintahan. Indonesia mulai menganut sistem demokrasi yang lebih utuh.

Jika dihitung sejak tahun 1998, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun ke-26 pasca reformasi. Selama rentang waktu tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan setidaknya enam kali pemilihan umum (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024), entah untuk memilih anggota parlemen atau presiden beserta wakilnya. Di atas kertas, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat diklaim relatif damai dan berjalan lancar. Sungguhpun dalam praksisnya terdapat aneka pertentangan yang tumbuh di kalangan kontestan pemilihan umum, namun hal itu tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam konstelasi politik di Indonesia. Agar pembahasan tidak melebar kemana-mana, penulis memberi tugas pada bagian “Pembahasan “ ini untuk mencari korelasi antara “gaya” *leadership* (kepemimpinan) Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dengan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke.

Sepak Terjang Presiden Jokowi

Dalam usianya yang telah menginjak 79 tahun, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden dan sejumlah wakil presiden. 7 presiden yang telah dan sedang memimpin Indonesia, memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Kepemimpinan (*leadership*), pada hakikatnya, adalah hal yang melekat pada diri seorang pemimpin (*leader*) yang berupa sifat atau tendensi khusus dalam hal kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*). Distingsi gaya kepemimpinan bisa ditelaah dalam dua aspek, yakni (a) kepemimpinan berdasarkan atas pertimbangan; dan (b) kepemimpinan atas dasar struktural.²⁴ Adanya distingsi karakteristik atau tendensi khusus dalam gaya kepemimpinan para presiden yang pernah atau sedang berkuasa di Indonesia membuat mereka memiliki

²⁴ Syugiarto dan Nasir Mangngasing, “Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 2.1 (2022): 29–38.

panggilan atau julukan khusus. Pemberian julukan atau panggilan khusus kepada presiden yang bersangkutan itu biasanya berkaitan erat dengan narasi-narasi berita yang ditawarkan oleh pers kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pemimpin mereka. Aneka komponen masyarakat, mulai dari rakyat sipil sebagai konstituen (juga dapat dimengerti sebagai “netizen” dalam ranah pelbagai platform media sosial) hingga pers yang memproduksi informasi, menyematkan julukan “bapak infrastruktur” kepada Presiden Jokowi. Julukan tersebut dialamatkan kepada Jokowi karena dalam masa kepemimpinannya sebagai presiden, dibangunlah banyak infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah, khususnya wilayah-wilayah tertinggal yang belum pernah disentuh oleh pemerintah sebelumnya.

Bagaimana kiprah Presiden Jokowi dalam memperjuangkan praksis demokrasi yang benar? Pelbagai lembaga survei dan instansi pemerintahan telah melakukan serangkaian riset mengenai hal tersebut. Hasil yang diperoleh dan simpulan yang diambil pun bunyinya beragam. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, kehidupan dan praksis demokrasi di Indonesia diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adapun tolok ukur penilaian yang diambil dalam indeks tersebut antara lain: keterlibatan sipil dalam pemilihan umum, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga-lembaga penjamin demokrasi. IDI mencatat, skor demokrasi di Indonesia pada tahun 2014 adalah 73,04 poin, tahun 2015 72,82 poin, tahun 2016 70,09 poin, tahun 2017 72,11 poin, dan 2018 72,39 poin. Dari cuplikan data itu, dapat disimpulkan bahwa situasi demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia relatif stabil.²⁵ Pada pembahasan lainnya, sementara orang menilai bahwa kualitas demokrasi pada masa Jokowi berkuasa belum mengalami peningkatan signifikan. Setelah periode pertama kepemimpinannya selesai pada 2019, belum banyak langkah demokratis yang diambil Jokowi. Pekerjaan rumah yang menanti untuk dituntaskan antara lain reformasi kepartaian, kebebasan pers (yang melekat dengan kebebasan berpendapat), peningkatan nilai fungsi anggota dewan, serta kualitas pemilihan umum.²⁶

Kiprah Jokowi sebagai presiden tidak berhenti pada 2019. Lewat pemilihan umum 2019, Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin dipercaya oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Satu atau dua tahun pascapelantikan sebagai presiden, Jokowi menghadapi banyak situasi pelik. Selain pandemi Covid-19 yang membuat banyak agenda negara dijadwalkan ulang, Jokowi harus menghadapi gejolak politik yang sangat kentara berkaitan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁷ Konsekuensinya ialah sederet kriminalisasi, pembatasan gerak, dan pelemahan nilai fungsi lembaga anti rasuah itu. Pelbagai polemik yang berkecamuk tersebut membuat pemerintah mendapatkan mosi tidak percaya dari rakyat.

Seiring bergulirnya waktu, fungsi dan tatanan politik barangkali mengalami apa yang disebut lompatan yang sedemikian jauh, namun tidak dengan budaya politik yang masih stagnan di kalangan politisi. Apa budaya politik Indonesia yang khas? Salah satunya tiada lain ialah perebutan kuasa atau suksesor jabatan dengan menghalalkan segala cara berbau nepotisme. Seakan-akan, nepotisme menjadi

²⁵ Irmaline Pakazeni dan Cindy Nabilla, “Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi.” *TheJournalish: Social and Government*. 1.3 (2020): 100–109.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

sebuah pekerjaan cukup menggiurkan bagi setiap pemangku kekuasaan. Dengan adanya kenyataan itu, kualitas demokrasi bisa semakin menurun atau mungkin saja sirna jika pemerintah menerbitkan pasal-pasal otoriter yang berperan untuk memuluskan jalan demi meraih posisi penting dengan cara yang “kotor”.

Ada hal menarik yang terjadi akhir-akhir ini dalam bingkai konsolidasi politik di Indonesia. Pada pemilu 2024 lalu, dari sudut pandang konstitusi Jokowi sudah tidak bisa lagi maju sebagai calon presiden. Di atas kertas memang begitu, namun publik bisa menyimak bagaimana Jokowi mementaskan strategi politis yang sangat cerdas namun cenderung pragmatik. Pelbagai macam taktik yang dilakukannya membuat Jokowi masih menjadi sosok yang diperhitungkan dalam percaturan politik Indonesia. Jokowi mempergunakan detik-detik terakhir masa jabatannya sebagai presiden untuk membuat berbagai kebijakan vital dan berpengaruh. Visi narasi dan retorika politiknya tetap sama: Jokowi masih dipandang sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bahasa yang dipakainya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan itu memperkuat “aura” sebagai pemimpin yang merakyat²⁸. Tradisi kunjungan kerja ke daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta, atau yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *blusukan*, masih sering dilakukannya. Fokus kepemimpinan yang ditentukan Jokowi dalam periode keduanya ini lebih kepada kontinuitas pembangunan. Segala jenis pembangunan dan reformasi di banyak lini menjadi komponen yang diperjuangkannya agar tidak diberhentikan oleh pemerintahan yang akan datang. Untuk itulah, Jokowi “bekerja keras” untuk membuat putusan krusial yang tidak jarang menuai cibiran atau kritik ajam, misalnya pemberian izin kelola tambang bagi organisasi keagamaan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan biaya kuliah, dan lain-lain²⁹.

Bagaimana kiprah Jokowi dalam dinamika kepartaian? Banyak pihak mengakui kepiawaian Jokowi dalam meramu taktik politik yang terkesan *out of the box* dan sulit diprediksi. Ia dinilai berhasil melakukan utak-atik formasi koalisi partai pendukung pemerintah dengan cara yang tidak terduga. Sungguh pun ia adalah kader aktif PDI Perjuangan, langkah yang diambil Jokowi ternyata bertujuan untuk menghimpun barisan pendukung dari pelbagai pihak, bahkan yang menjadi lawan politiknya dalam pemilu 2019 silam. Salah satu partai yang kepincut dengan sikap Jokowi ini adalah Partai Gerindra. Partai berlambang kepala burung garuda itu akhirnya masuk dalam jajaran koalisi pendukung pemerintah. Selain merangkul lawan politik, Jokowi dinilai berhasil mengintervensi “urusan dapur” partai lain. Hal itu bisa disimak dari pelbagai keputusan yang dibuatnya, dan ajaibnya itu bisa mempengaruhi putusan dan sikap politis sebuah partai.³⁰

Evaluasi

Jika menyimak teori pembagian kekuasaan yang ditawarkan oleh John Locke seraya mengkomparasikannya dengan realitas kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara gamblang, tata kelola pemerintahan Indonesia masih setia

²⁸ Oxana Putri Fieda, Gede Indra Pramana, and Tedi Erviantono, “Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional: Peran Jokowi Sebagai ‘King Maker’ Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024,” *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 5 (2024): 136–47.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dengan teori pembagian kekuasaan John Locke tersebut.³¹ Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya distingsi antara kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD), eksekutif (presiden dan wakil presiden), serta yudikatif (MA, MK, dan KY). Memang, substansi kesetiaan yang dimaksud penulis di sini bukan berarti setia kepada pendapat John Locke semata, tetapi karena pemerintah masih setia berpegang pada konstitusi yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan. Namun, meskipun secara formal terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, dalam praktiknya sering kali muncul dinamika yang menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut. Misalnya, eksekutif terkadang dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam ranah legislatif melalui kebijakan dan peraturan yang diusulkan pemerintah. Di sisi lain, lembaga yudikatif berperan penting dalam menjaga *check and balance* melalui putusan-putusan yang mengawasi kebijakan pemerintah, memastikan semuanya sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, meski tata kelola pemerintahan Indonesia tampak setia pada pembagian kekuasaan ala Locke dan UUD 1945, tetap ada tantangan dan dinamika yang muncul dalam menjaga harmoni antar cabang kekuasaan tersebut.³² Pembagian kekuasaan mesti dijalankan dengan arif dan bijaksana. Semua pihak mesti menjalankan tugasnya masing-masing tanpa ada intensi untuk mengintervensi pihak lainnya. Terjadinya intervensi atau “obok-obok” antarpihak membuat jalannya pemerintahan menjadi terseok-seok.

Mengapa presiden Indonesia yang terpilih pasca peristiwa 1998 cenderung mendesain koalisi besar? Apakah hal ini terlihat sebagai usaha untuk meniadakan oposisi? Apakah fenomena ini berhubungan dengan keinginan bernuansa pragmatis para penguasa yang mendambakan kondisi yang solid dan efektif? Beberapa pakar politik mengafirmasi bahwa kejadian semacam ini tidak bisa dipandang sebagai hal yang kurang baik terutama dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. Menurut pandangan mereka, demokrasi yang baik ialah kondisi tersedianya koalisi dan oposisi pemerintah.³³ Hubungan yang terjadi keduanya adalah relasi saling membutuhkan. Kalau salah satu pihak dilemahkan melalui berbagai macam cara, maka pihak itu akan mengalami degradasi nilai guna. Disadur dari tulisan Ulil Abshar Abdalla dalam kolom analisis politik pada kompas.id (25 April 2024), gestur penguasa yang rada alergi terhadap eksistensi oposisi dalam pemerintahan ini disebabkan oleh budaya “harmoni” yang sudah mendarah daging di Indonesia. Setiap konflik pasti diselesaikan dengan cara konsensus, dialog, pencarian jalan tengah, usaha mencari *win-win-solution*, dan lain-lain. Bangsa kita sangat terbiasa dengan cara-cara semacam ini, bukan mengatasinya dengan dialektika, adu argumentasi sejauh-jauhnya, dan lain-lain. Di atas semua itu, penjelasan yang cukup penting dituliskan di sini ialah tantangan demi tantangan yang harus dilewati setiap presiden pasca reformasi: kekuasaan yang efektif demi pembangunan negara yang berkelanjutan.

Menyimak Dampak Pelemahan Oposisi

³¹ Oxana Putri Fieda, Gede Indra Pramana, dan Tedi Eviantono, “Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional: Peran Jokowi Sebagai ‘King Maker’ Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024” *RETORIKA: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*. 1.5 (2024): 136–147.

³² Munadi, “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia.”

³³ Alifa Ulfiyyati dkk., “Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan” *Advances in Sosial Humanities Research*. 1.4 (2023).

Pelemahan oposisi dalam konteks pemerintahan Indonesia berdampak signifikan terhadap keseimbangan politik dan proses demokrasi. Oposisi yang lemah dapat mengurangi efektivitas mekanisme *check and balance* yang seharusnya mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Selain itu, pelemahan oposisi juga bisa mengakibatkan kurangnya kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Tanpa peran oposisi yang kuat, suara rakyat yang berbeda pendapat dengan pemerintah mungkin kurang terwakili, mengurangi dinamika demokrasi yang sehat dan berpotensi memperkuat dominasi satu partai atau kelompok politik tertentu. Beberapa kanal berita daring mengendus fenomena ini berdampak buruk bagi upaya atau proses *check and balance* yang profesional bagi penguasa. Peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai instrumen pengawas penguasa menjadi mandul, sebab isi lembaga tersebut adalah kader-kader partai pendukung pemerintah, yang mau tidak mau juga mendukung aneka kebijakan pemerintah.³⁴ Isu ini disinyalir dapat membuat pemerintah sebagai penguasa yang tidak terkontrol. Kondisi ini bisa menimbulkan risiko kebijakan yang dibuat tanpa melalui proses evaluasi yang matang, karena tidak ada kekuatan oposisi yang signifikan untuk menantang atau mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lebih jauh, kondisi ini juga bisa memicu ketidakpuasan publik, karena suara yang berbeda atau kritik terhadap pemerintah tidak mendapat ruang yang layak dalam ranah politik. Akibatnya, demokrasi berpotensi tereduksi menjadi formalitas belaka, di mana pemerintah bisa menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol yang efektif dari lembaga legislatif yang seharusnya bersikap independen.

Relevansi Pembagian Kekuasaan

Relevansi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan demokrasi kontemporer tetap sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya otoritarianisme. Dengan membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing cabang memiliki peran khusus dan dapat saling mengawasi agar tidak ada satu pihak yang memonopoli kekuasaan. Dalam konteks modern, pembagian kekuasaan juga relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti transparansi, korupsi, dan keterbukaan informasi. Pembagian kekuasaan memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan hukum, sekaligus menjaga dinamika demokrasi yang sehat. Hal ini juga memberikan ruang bagi keberagaman suara dan pendapat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Penutup

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa melemahnya peran oposisi di Indonesia selama era pemerintahan Joko Widodo memiliki implikasi serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan oleh John Locke sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang tidak diimbangi dengan kekuatan oposisi yang efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun secara formal pembagian kekuasaan masih berjalan, realitas politik di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga fungsi pengawasan yang seimbang dan

³⁴ Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan."

adil. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pengambilan keputusan yang tidak terkontrol, yang dapat melemahkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pada dasarnya, sistem pemerintahan yang sehat membutuhkan dinamika politik yang aktif di mana oposisi berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan eksekutif. Namun, pengurangan efektivitas oposisi dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemerintahan, sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif selama pemerintahan Jokowi cenderung mengurangi peran oposisi, baik secara langsung melalui strategi politik maupun secara tidak langsung melalui konsolidasi kekuatan politik di parlemen. Jika fenomena ini terus berlangsung, maka sistem demokrasi di Indonesia bisa menjadi semakin terpusat dan kurang responsif terhadap suara rakyat.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam memperkuat kembali peran oposisi. Salah satu cara adalah dengan memperkuat independensi lembaga legislatif, memastikan kebebasan pers, dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif agar demokrasi di Indonesia tetap sehat dan dinamis. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berimbang, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Daftar Rujukan

- Akbar, Affan dkk. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia." *Advances in Sosial Humanities Research* 1.5 (2023).
- Bratakusumah, Deddy Supriady. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 2.3 (2018).
- Buana, Mirza Satria. "Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum." *UNDANG: Jurnal Hukum* 6.2 (2023).
- Fieda, Oxana Putri, Gede Indra Pramana, dan Tedi Erviantono. "Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional: Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1.5 (2024): 136–147.
- Fieda, Oxana Putri, Gede Indra Pramana, dan Tedi Eviantono. "Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional: Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024." *RETORIKA: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1.5 (2024): 136–147.
- Gough, J.W. *John Locke's Political Philosophy*. London: Oxford University Press, 1950.
- Hamja, Buhar. "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi." *Justisia* 7.14 (2020).
- Hardiman, F.Budi. *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Haryanto, Ignatius. *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Gramedia, 2021.

- Locke, John. *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*. Trans. A Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Munadi, Munadi. "Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2.1 (2019).
- Nada, Fitria Qutrul, Aswatun Hasanah, dan Siti Tiara Maulia. "Perjalan Demokrasi di Indonesia." *CIVILIA: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.2 (2023).
- Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016).
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10.2 (2016).
- Pakazeni, Irmaline, dan Cindy Nabilla. "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi." *TheJournalish: Social and Government* 1.3 (2020): 100–109.
- Suparto. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat* 4.1 (2016).
- Syanur, Asitha Dewi Mustika, Ida Bagus Shantih, dan Lucy Afrilia. "Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi." *KULTURA: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.3 (2023): 17–26.
- Syugiarto, dan Nasir Mangngasing. "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2.1 (2022): 29–38.
- Ulfyyati, Alifa dkk. "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan." *Advances in Sosial Humanities Research* 1.4 (2023).